

**SISTEM PENGAWASAN KEUANGAN DI BAITUL MAAL WA TAMWIL  
(BMT) BINA IHSANUL FIKRI (BIF) KANTOR PUSAT  
REJOWINANGUN YOGYAKARTA TAHUN 2020**



**SKRIPSI**

**Diajukan kepada Fakultas Dakwah dan Komunikasi  
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta  
untuk Memenuhi Sebagian Syarat-syarat  
Memperoleh Gelar Sarjana Strata I**

**Oleh:**

**Devi Meidawati  
NIM. 17102040085**

**Dosen Pembimbing:  
Drs. Muhammad Rosyid Ridla, M.Si  
NIP. 19670104 199303 1 003**

**PRODI MANAJEMEN DAKWAH  
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA**

**2021**



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 515856 Fax. (0274) 552230 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-647/Un.02/DD/PP.00.9/04/2021

Tugas Akhir dengan judul : SISTEM PENGAWASAN KEUANGAN DI BAITUL MAAL WA TAMWIL (BMT) BINA IHSANUL FIKRI (BIF) KANTOR PUSAT REJOWINANGUN YOGYAKARTA TAHUN 2020

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : DEVI MEIDAWATI  
Nomor Induk Mahasiswa : 17102040085  
Telah diujikan pada : Kamis, 25 Maret 2021  
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

Drs. M. Rosyid Ridla, M.Si.

SIGNED

Valid ID: 607932400c236



Penguji I

Dr. Hikmah Endraswati, S.E.,M.Si.

SIGNED

Valid ID: 6077678881e2



Penguji II

Dr. Dra. Hj. Mikhriani, MM

SIGNED

Valid ID: 60780ac7b6a3e



Yogyakarta, 25 Maret 2021

UIN Sunan Kalijaga

Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi

Prof. Dr. Hj. Marhumah, M.Pd.

SIGNED

Valid ID: 60793692e2fd0



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI

Alamat : Jl. Marsda Adisucipto, Telp. (0274) 515856, Fax. (0274) 552230  
E-mail: [fd@uin-suka.ac.id](mailto:fd@uin-suka.ac.id), Yogyakarta 55281

---

## SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Kepada:

Yth. Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Di Yogyakarta

*Assalamu 'alaikum wr.wb*

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk, dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku dosen pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Devi Meidawati

NIM : 17102040085

Program Studi : Manajemen Dakwah

Judul Skripsi : Sistem Pengawasan Keuangan di Baitul Maal wa Tamwil (BMT) Bina Ihsanul Fikri (BIF) Kantor Pusat Rejowinangun Yogyakarta tahun 2020

Sudah dapat diajukan dan didaftarkan kepada Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam bidang Manajemen Dakwah.

Dengan ini kami berharap agar skripsi tersebut dapat segera dimunaqosyahkan.

Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu 'alaikum wr.wb*

Yogyakarta, 15 Maret 2021

Mengetahui,

Ketua Program Studi Manajemen Dakwah

Pembimbing

H. M. Toriq Nurmadiansyah, S.Ag., M.Si.  
NIP. 19690227 200312 1 001

Drs. Muhammad Rosvid Ridla, M.Si  
NIP. 19670104 199303 1 003

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Devi Meidawati  
NIM : 17102040085  
Program Studi : Manajemen Dakwah  
Fakultas : Dakwah dan Komunikasi

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa skripsi yang berjudul: **“Sistem Pengawasan Keuangan di Baitul Maal wa Tamwil (BMT) Bina Ihsanul Fikri (BIF) Kantor Pusat Rejowinangun Yogyakarta tahun 2020”** adalah hasil karya pribadi yang tidak mengandung pelanggaran dan tidak berisi materi yang dipublikasikan atau ditulis orang kecuali bagian-bagian tertentu yang peneliti ambil sebagai acuan dengan tatacara yang dibenarkan secara ilmiah.

Apabila terbukti pernyataan ini tidak benar, maka peneliti siap untuk mempertanggungjawabkan sesuai hukum yang berlaku.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 12 Maret 2021

Yang menyatakan



Devi Meidawati  
NIM. 17102040085

## **HALAMAN PERSEMBAHAN**

Dengan mengucapkan syukur kepada Allah SWT

Peneliti mempersembahkan skripsi ini kepada almamater tercinta:

Program Studi Manajemen Dakwah

Fakultas Dakwah dan Komunikasi

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
YOGYAKARTA

## MOTTO

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ  
إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿١٨﴾

Artinya:

“Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat). Bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan.” (Q.S. Al-Hasyr: 18).<sup>1</sup>

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

---

<sup>1</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, Badan Penelitian, Pengembangan, Pendidikan, dan Pelatihan, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), hlm. 809.

## KATA PENGANTAR

*Alhamdulillah* rabbil'alam, segala puji syukur peneliti panjatkan atas kehadiran Allah SWT, atas segala rahmat, nikmat, taufik, hidayah, serta inayah yang diberikan-Nya, sehingga sampai saat ini peneliti masih diberi kesempatan untuk menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul **“Sistem Pengawasan Keuangan di Baitul Maal wa Tamwil (BMT) Bina Ihsanul Fikri (BIF) Kantor Pusat Rejowinangun Yogyakarta tahun 2020”**. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita nabi agung Nabi Muhammad SAW, yang telah menunjukkan kita dari zaman *jahiliyah* menuju zaman terang benderang yakni *addinul islam*.

Peneliti menyadari dengan sepenuh hati bahwa dalam penelitian skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan dan kesalahan. Itu semua dikarenakan keterbatasan pengetahuan yang peneliti miliki. Selain itu, skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan, dorongan, maupun do'a dari berbagai pihak. Sudah sepatutnya peneliti mengucapkan rasa terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan dan dukungan demi terselesaikannya skripsi ini. Oleh karena itu, peneliti mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Phil Al Makin, MA., selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Ibu Prof. Dr. Hj. Marhumah, M.Pd., selaku Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

3. Bapak H. M. Toriq Nurmadiansyah, S.Ag., M.Si., selaku Ketua Program Studi Manajemen Dakwah, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Ibu Dr. Hikmah Endraswati, SE., M.Si., selaku Sekretaris Program Studi Manajemen Dakwah, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
5. Bapak Drs. Rosyid Ridla, M.Si., selaku DPS (Dosen Pembimbing Skripsi), atas ketekunan dan kesabarannya dalam meluangkan waktu, tenaga, dan pikirannya untuk membimbing dan memberikan ilmu yang sangat bermanfaat sehingga penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan. Terima kasih juga karena telah menjadi dosen yang sangat baik, pengertian, dan selalu memotivasi peneliti.
6. Bapak H. Andy Dermawan, M.Ag., selaku DPA (Dosen Pembimbing Akademik) yang telah sabar, baik, giat, dan semangat dalam memberikan bimbingan selama proses perkuliahan berlangsung.
7. Seluruh Dosen Program Studi Manajemen Dakwah yang telah membimbing, mendidik, serta mencurahkan berbagai ilmu selama perkuliahan.
8. Seluruh staff dan karyawan di lingkungan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah membantu dalam memberikan fasilitas pada peneliti hingga penyelesaian skripsi.
9. Bapak Muhammad Ridwan, selaku ketua badan pengurus BMT BIF Kantor Pusat Rejowinangun Yogyakarta, yang telah memberikan izin penelitian dan membantu memberikan data guna penyelesaian skripsi ini.



10. Bapak Sushardi selaku Dewan Pengawas Manajemen, Bapak Saifu Rijal selaku Bendahara, mbak Ema Pratiwi selaku pembukuan, Ibu Fitri dan karyawan lainnya yang telah bersedia membantu peneliti dalam menyelesaikan penelitian di BMT BIF Kantor Pusat Rejowinangun Yogyakarta.
11. Kedua orangtua tercinta, Bapak Jami'an dan Ibu Ida Nur Laela, yang selalu menyebutku dalam do'anya, semoga peneliti menjadi anak yang bermanfaat. Beliau juga selalu sabar dan semangat dalam memberikan dukungan, baik berupa moril maupun materil kepada peneliti, sehingga peneliti tetap kuat dan selalu bersemangat dalam menjalani studi.
12. Keluarga besar Alm. Mbah Mustam dan Almh. Mbah Aminten, serta keluarga besar Alm. Mbah Salim dan Almh. Mbah Patemi, yang selalu memberikan dukungan kepada peneliti, hingga peneliti semangat untuk menempuh pendidikan hingga perguruan tinggi ini.
13. Lukman, *partner* terbaik dan tersabar, yang selalu mendengarkan keluh kesah peneliti, selalu membantu, memberikan dukungan dan do'a-do'a yang baik kepada peneliti, selama perkuliahan dan dalam penyusunan skripsi ini hingga selesai. Semoga Allah akan membalas semua kebaikan yang telah dia berikan.
14. Sahabat dirumah Vicky Ayu dan Vita yang sudah seperti saudara sendiri, kemana-mana selalu bareng, terimakasih banyak telah menjadi yang terbaik.
15. Gengster Teri dan Cingciripit, Anisa, Sansidar, Ninik, Puput, Melly, Indah R, dan Indah S, yang sudah kenal baik dari maba, berjuang bareng, Semoga sampai kapanpun pertemanan ini semakin baik, tidak ada yang saling lupa.
16. Teman terbaik dan teman ghibah dimasa futsal, Alya Paul, Sansidar, dan Rista.

17. Keluarga BMT MD, Reza, mbak Nabil, mbak Maya, mbak Nia, Putri, Anjani, dan Aisyah, yang telah berbagi ilmu selama menjadi pengurus di BMT MD.
18. Teman magang di Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY, Karina, Defi Sri, Dea, dan Ojil, yang sudah bertukar berbagai ilmu, ghibah, dan becanda bareng.
19. Seluruh teman-teman MD 2017 (Meelathera), baik teman teman satu DPA, teman satu DPS, teman becanda, dan teman yang telah berbagi ilmu selama perkuliahan.
20. Teman-teman KKN angkatan 102, kelompok 147 dan 148 Desa Sekar, Kec. Sekar, Kab. Bojonegoro, yang sudah berjuang bareng, hidup bareng, selama satu bulan di posko, semoga pertemanan kita tetap terjaga sampai kapanpun.
21. Teman-teman kost Asrama Van Orange, khususnya Anisa, Ana, Alya, dan Arum, terimakasih atas dukungan dan semangatnya.
22. Seluruh pihak yang telah membantu dan memotivasi dalam penyelesaian skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu per satu.

Semoga Allah SWT memberikan balasan yang berlipat ganda atas bantuan dan kebaikan yang telah diberikan kepada peneliti, dan semoga bantuan, dukungan, bimbingan, dan do'a tersebut dapat diterima sebagai amal baik oleh Allah SWT.

Yogyakarta, 12 Maret 2021

Peneliti

Devi Meidawati  
17102040085

## ABSTRAK

Devi Meidawati (17102040085), “Sistem Pengawasan Keuangan di Baitul Maal wa Tamwil (BMT) Bina Ihsanul Fikri (BIF) Kantor Pusat Rejowinangun Yogyakarta tahun 2020”. *Skripsi*, Jurusan Manajemen Dakwah, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2021.

BMT BIF Kantor Pusat Rejowinangun Yogyakarta merupakan sebuah lembaga keuangan mikro syariah yang terbentuk di bawah payung hukum Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS). Didirikan dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas usaha ekonomi demi kesejahteraan masyarakat. BMT BIF Kantor Pusat Rejowinangun Yogyakarta bergerak dalam sektor keuangan seperti halnya lembaga keuangan bank yang memiliki risiko tinggi atas keuangan yang dikelolanya. Oleh karena itu, sistem pengawasan keuangan yang baik penting untuk dilakukan, karena dengan adanya pengawasan keuangan dapat meminimalisir kesalahan dalam laporan keuangan, dan menghindari terjadinya suatu penyimpangan.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana sistem atau tatacara pengawasan keuangan dan mendeskripsikan mengenai pengawasan internal yang dilakukan di BMT BIF Kantor Pusat Rejowinangun Yogyakarta tahun 2020. Menggunakan teori pengawasan menurut T. Hani Handoko yang terdiri dari penetapan standar pelaksanaan (perencanaan), penentuan pengukuran pelaksanaan kegiatan, pengukuran pelaksanaan kegiatan, analisis perbandingan antara pelaksanaan kegiatan dengan standar perencanaan, dan pengambilan tindakan koreksi. Penelitian ini termasuk dalam penelitian kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan yakni wawancara, observasi, dan dokumentasi. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data *interactive model* menurut Miles dan Huberman. Sedangkan untuk menguji keabsahan data dengan menggunakan teknik triangulasi sumber, dan triangulasi teknik pengumpulan data.

Hasil penelitian ini adalah BMT BIF Kantor Pusat Rejowinangun Yogyakarta pada tahun 2020 telah melaksanakan sistem pengawasan keuangan dengan baik, melalui proses pengawasan yaitu, penetapan standar pelaksanaan (perencanaan), penentuan pengukuran pelaksanaan kegiatan, pengukuran pelaksanaan kegiatan, analisis perbandingan antara pelaksanaan kegiatan dengan standar perencanaan, dan pengambilan tindakan koreksi. Pengawasan internal BMT BIF Kantor Pusat Rejowinangun Yogyakarta berjalan dengan efektif dan efisien, dilihat melalui pengelolaan dari segi akuntansi. Laporan keuangan juga selalu selesai tepat waktu, dengan menggunakan komputer dan program komputer yang digunakan sudah sesuai dengan standar akuntansi. Namun, pada tahun 2020 BMT BIF Kantor Pusat Rejowinangun Yogyakarta tidak dapat mencapai target yang telah ditentukan karena adanya penyimpangan dari faktor eksternal yaitu pandemi Covid-19, sehingga banyak kegiatan yang terkendala.

**Kata Kunci : Sistem Pengawasan, Pengawasan Internal, BMT BIF**

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	<b>ii</b>
<b>SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI.....</b>	<b>iii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI .....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>v</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>vi</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vii</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>xi</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xv</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>xvi</b>
<b>BAB I: PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	6
E. Kajian Pustaka .....	7
F. Kerangka Teori .....	11
G. Metode Penelitian .....	32
H. Sistematika Pembahasan .....	42

## **BAB II: GAMBARAN UMUM**

A. Sejarah BMT BIF Kantor Pusat Rejowinangun Yogyakarta ...	43
B. Letak Geografis BMT BIF Kantor Pusat Rejowinangun Yogyakarta .....	45
C. Visi, Misi, dan Tujuan BMT BIF Kantor Pusat Rejowinangun Yogyakarta .....	46
D. Struktur Organisasi BMT BIF Kantor Pusat Rejowinangun Yogyakarta .....	48
E. <i>Job Description</i> Pengurus BMT BIF Kantor Pusat Rejowinangun Yogyakarta .....	49
F. Produk-Produk BMT BIF Kantor Pusat Rejowinangun Yogyakarta .....	57

## **BAB III: PEMBAHASAN**

A. Proses Pengawasan Keuangan	
1. Penetapan Standar Pelaksanaan (Perencanaan).....	62
2. Penentuan Pengukuran Pelaksanaan Kegiatan .....	73
3. Pengukuran Pelaksanaan Kegiatan.....	77
4. Analisis Perbandingan antara Pelaksanaan Kegiatan dengan Standar Perencanaan .....	81
5. Pengambilan Tindakan Koreksi .....	85
B. Pengawasan Internal	
1. Struktur Organisasi yang Baik .....	89
2. Sistem Otorisasi dan Tanggungjawab yang Jelas .....	93

3. Struktur Akuntansi yang Baik .....	95
4. Kebijakan Personalia yang Baik.....	96
5. Adanya Badan atau Staf Internal Audit.....	97
6. Dewan Pengawas yang Kompeten dan Aktif .....	99
<b>C. Laporan Pengawasan Keuangan</b>	
1. Prinsip-Prinsip Akuntansi dalam Laporan Keuangan .....	100
2. Macam-Macam Laporan Keuangan .....	104
3. Pengawasan Keuangan .....	116
4. Tujuan Pengawasan Keuangan.....	127
<b>BAB IV: PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan.....	130
B. Saran .....	132
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>134</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
 YOGYAKARTA

## DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Laporan Laba Rugi KSPPS BMT BIF Target 2020 .....	66
Tabel 3.2 Rasio Keuangan KSPPS BMT BIF Target 2020 .....	68
Tabel 3.3 Neraca Konsolidasi KSPPS BMT BIF 2020 .....	106
Tabel 3.4 Laporan Laba Rugi KSPPS BMT BIF Target 2020 .....	112
Tabel 3.5 Laporan Laba Rugi KSPPS BMT BIF 31 Desember 2020.....	113
Tabel 3.6 Target 2020 KSPPS BMT BIF .....	117
Tabel 3.7 Analisis Rasio Keuangan BMT BIF Tahun 2020 .....	118

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Komponen Analisis Data Model Miles dan Huberman .....	37
Gambar 1.2 Triangulasi Sumber Data.....	40
Gambar 1.3 Triangulasi Teknik Pengumpulan Data.....	41
Gambar 2.1 Letak Geografis BMT BIF Kantor Pusat Rejowinangun Yogyakarta .....	45
Gambar 3.1 Struktur Pengawasan Keuangan BMT BIF Kantor Pusat Rejowinangun Yogyakarta.....	91
Gambar 3.2 Tingkatan Level Manajemen dalam Struktur Pengawasan Keuangan BMT BIF.....	91





# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Pengawasan merupakan salah satu fungsi dalam manajemen suatu organisasi. Dimana pengawasan memiliki arti suatu proses mengawasi dan mengevaluasi suatu kegiatan. Pengawasan juga diartikan sebagai suatu upaya yang sistematis untuk menetapkan kinerja standar pada perencanaan dalam merancang sistem umpan balik informasi, untuk membandingkan kinerja aktual dengan standar yang telah ditentukan, untuk menetapkan apakah telah terjadi suatu penyimpangan atau tidak, dan juga untuk mengambil tindakan perbaikan yang diperlukan untuk menjamin bahwa semua sumber daya perusahaan atau pemerintahan telah digunakan seefektif dan seefisien mungkin guna mencapai tujuan perusahaan atau pemerintahan tersebut. Dari beberapa pendapat tersebut dapat ditarik kesimpulan, bahwa pengawasan merupakan suatu hal yang sangat penting untuk melakukan suatu perencanaan.<sup>1</sup> Adanya pengawasan yang baik maka perencanaan yang diharapkan oleh manajemen dapat berjalan dengan maksimal.

Pengawasan dalam pandangan Islam dilakukan dengan adanya tujuan yang baik, dimana pengawasan tersebut dilakukan untuk meluruskan yang tidak lurus, mengoreksi yang salah, dan membenarkan sesuatu yang hak

---

<sup>1</sup> Rahardjo Adisasmito, *Pengelolaan Pendapatan & Anggaran Daerah*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011), hlm. 63.

(membenarkan kebenaran).<sup>2</sup> Pengawasan (*control*) dalam ajaran Islam (hukum syariah) terdiri dari dua hal, yaitu kontrol yang berasal dari diri sendiri yang bersumber dari tauhid dan keimanan kepada Allah SWT, sedangkan yang kedua yakni sebuah pengawasan dari luar (sistem atau publik).<sup>3</sup>

Baitul Maal wa Tamwil yang biasa disingkat dengan BMT merupakan lembaga keuangan syariah yang berbadan hukum koperasi simpan pinjam dan pembiayaan syariah. BMT bergerak dalam sektor keuangan seperti halnya lembaga keuangan bank yang memiliki risiko yang tinggi, oleh karena itu diperlukan elemen pengawasan dan pembinaan dari lembaga terkait. Mengapa perlu adanya pengawasan BMT, karena ketika krisis moneter pada tahun 1998 BMT dan perbankan syariah memiliki sumbangan besar terhadap perekonomian Indonesia terutama sektor usaha mikro. Dapat kita ketahui bahwa keberadaan BMT sebagai lembaga keuangan mikro merupakan sebuah pilar ekonomi yang tidak boleh kita abaikan karena dapat menopang sistem keuangan.<sup>4</sup> Kegagalan dalam membina BMT di Indonesia dapat menyebabkan terganggunya sektor lembaga ekonomi mikro, karena sebagian besar kredit mikro didukung oleh BMT dan LKS. Oleh karena itu, lembaga yang bertugas dalam melakukan pengawasan terhadap BMT harus memiliki tanggungjawab yang besar.

---

<sup>2</sup> Abdul Mannan, *Membangun Islam Kaffah*, (Jakarta: Madina Pustaka, 2000), hlm. 152.

<sup>3</sup> Didin Hafifudhin dan Hendri Tanjung, *Manajemen Syariah dalam Praktek*, (Jakarta: Gema Insani, 2003), hlm. 156.

<sup>4</sup> Slamet Mujiono, "Urgensi Regulasi Pengawasan Baitul Wat Tanzil (BMT) di Indonesia", *Jurnal Ilmu Ekonomi Islam*, Vol. 2, No. 1, 2018, hlm. 75.

Pengawasan terhadap BMT atau koperasi syariah untuk pelaksanaannya diawasi oleh tiga lembaga, diantaranya yaitu Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Dewan Pengawas Syariah (DPS), dan Kementerian Koperasi. BMT perlu mendapatkan pengawasan dan pembinaan dari lembaga tersebut, supaya dapat meningkatkan profesionalismenya.<sup>5</sup>

Berita Republika menginformasikan bahwa dengan diatur dan diawasi oleh OJK tentu akan menjadikan BMT lebih kuat dan memiliki sistem yang semakin baik, bahkan diharapkan menjadi lembaga keuangan mikro andalan pemerintah yang berdasarkan aturan ekonomi Islam.<sup>6</sup> Namun dalam berita Kompas dijelaskan bahwa pengawasan yang tercakup dalam tugas OJK tidak termasuk lembaga keuangan yang berbentuk koperasi, lembaga keuangan mikro, dan BMT, dimana OJK hanya ditugasi untuk mengawasi bank, Bank Perkreditan Rakyat (BPR), dan lembaga keuangan bukan bank. Sering terjadi kekosongan pengawasan keuangan pada koperasi, BMT, dan lembaga keuangan mikro yang memiliki potensi masalah, karena disini tidak adanya komunikasi yang mapan antara OJK dengan kementerian koperasi, UKM, BMT, dan lembaga keuangan mikro.<sup>7</sup> Dari hal ini dapat diketahui bahwa pihak

---

<sup>5</sup> Shallman, *Pengawasan Baitul Maal Wat-tamwil (BMT) Berbadan Hukum*, <https://shallmanalfarizy.com/2017/12/pengawasan-baitul-maal-wat-tamwil-bmt-berbadan-hukum>, dipublikasikan pada tanggal 8 Desember 2017, diakses pada hari Kamis, tanggal 17 September 2020, pukul 20.42 WIB.

<sup>6</sup> Irwan Kelana, *BMT Gerakkan Ekonomi Rakyat*, <https://republika.co.id/berita/n73i462/bmt-gerakkan-ekonomi-rakyat>, dipublikasikan pada hari Jum'at, tanggal 13 Juni 2014, pukul 14.00 WIB, diakses pada hari Kamis, tanggal 17 September 2020, pukul 22.25 WIB.

<sup>7</sup> Orin Basuki, *Pengawasan OJK Bolong di Koperasi dan BMT*, <https://lifestyle.kompas.com/read/2011/11/02/23441612/pengawasan.ojk.bolong.di.koperasi.dan.bmt>, dipublikasikan pada hari Rabu, tanggal 2 November 2011, pukul 14.00 WIB, diakses pada hari Jum'at, tanggal 18 September 2020, pukul 00.27 WIB.

yang bertugas dalam mengawasi keuangan BMT belum bertanggungjawab penuh dalam menjalankan tugasnya. Tanpa adanya sistem pengawasan keuangan yang baik, maka akan menghasilkan manajemen keuangan yang kurang optimal, sehingga tanggung jawab lembaga pengawasan keuangan BMT sangat dibutuhkan.

Baitul Maal wa Tamwil (BMT) Bina Ihsanul Fikri untuk selanjutnya disingkat dengan BMT BIF merupakan sebuah lembaga keuangan mikro syariah yang terbentuk di bawah payung hukum Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS), selain itu BMT BIF merupakan lembaga keuangan dengan pola bagi hasil yang didirikan dan dimiliki oleh masyarakat. BMT BIF didirikan karena banyaknya usaha kecil yang kebutuhan modalnya dicukupi oleh rentiner dan lintah darat yang suku bunganya sangat besar. Disamping itu, dakwah Islam belum mampu menyentuh kebutuhan ekonomi, sehingga misi dakwah belum terasa sempurna. Melihat keadaan yang cukup memprihatinkan mendorong niat untuk segera mendirikan BMT BIF. Didirikannya BMT BIF bertujuan untuk meningkatkan kualitas usaha ekonomi demi kesejahteraan masyarakat.<sup>8</sup>

Dapat diketahui bahwa BMT BIF semakin tahun semakin berkembang, dimana sekarang ini sudah memiliki 11 Kantor Cabang yang tersebar di seluruh Daerah Istimewa Yogyakarta. Kantor Cabang tersebut terdiri dari, Kantor Cabang Kota I, Kantor Cabang Nitikan, Kantor Cabang Bugisan, Kantor

---

<sup>8</sup> *Sejarah Singkat BMT Bina Ihsanul Fikri*, <https://bmt-bif.co.id/halaman/detail/sejarah-singkat>, diakses pada hari Selasa, tanggal 13 Oktober 2020, pukul 21.55 WIB.

Cabang Parangtritis, Kantor Cabang Berbah, Kantor Cabang Gamping, Kantor Cabang Tajem, Kantor Cabang Gunung Kidul, Kantor Cabang Sleman Kota, Kantor Cabang Pleret, dan Kantor Cabang Kulon Progo.<sup>9</sup> BMT BIF harus selalu menjadi lembaga keuangan syariah yang sehat dan unggul dalam memberdayakan umat, seperti visi yang telah disepakati. Bisa mempunyai Kantor Cabang sebanyak itu, tentu menjadikan BMT BIF mempunyai tanggung jawab yang besar, khususnya dalam sistem pengawasan keuangan. Dimana pihak yang bertugas dalam pengawasan keuangan harus menjalankan tugasnya sesuai dengan amanah yang telah diembannya.

Berdasarkan paparan di atas, sistem pengawasan keuangan yang baik sangatlah penting bagi suatu lembaga. Olehnya peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Sistem Pengawasan Keuangan di Baitul Maal wa Tamwil (BMT) Bina Ihsanul Fikri (BIF) Kantor Pusat Rejowinangun Yogyakarta tahun 2020”**. Sistem pengawasan dalam BMT dilakukan dengan dua model yakni pengawasan internal dan pengawasan eksternal. Namun, dalam penelitian ini peneliti hanya berfokus pada sistem pengawasan keuangan secara internal di BMT BIF Kantor Pusat Rejowinangun Yogyakarta tahun 2020.

---

<sup>9</sup> *Ibid.*,

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat diketahui rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana sistem pengawasan keuangan di BMT BIF Kantor Pusat Rejowinangun Yogyakarta tahun 2020 ?

## **C. Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan rumusan masalah, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana sistem atau tatacara pengawasan keuangan yang dilakukan di BMT BIF Kantor Pusat Rejowinangun Yogyakarta tahun 2020. Selain itu ada tujuan lain yakni untuk mendeskripsikan mengenai pengawasan internal yang dilakukan di BMT BIF Kantor Pusat Rejowinangun Yogyakarta tahun 2020.

## **D. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

### **1. Manfaat Teoritis**

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan bisa menambah wawasan ilmu pengetahuan, dan dapat memberi masukan bagi pengembangan ilmu manajemen dibidang keuangan terutama masalah sistem pengawasan keuangan bagi pihak BMT BIF Kantor Pusat Rejowinangun Yogyakarta, peneliti selanjutnya dan juga masyarakat.

## 2. Manfaat Praktis

### a. Bagi lembaga

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan kepada lembaga yang terkait, yaitu BMT BIF Kantor Pusat Rejowinangun Yogyakarta, dalam upaya meningkatkan sistem pengawasan keuangan yang baik dalam lembaga ini.

### b. Bagi peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wacana dan memperoleh gambaran langsung mengenai bagaimana cara yang harus dilakukan dalam menangani masalah mengenai lembaga-lembaga pengawas keuangan yang belum bertanggungjawab penuh atas tugasnya dalam melakukan pengawasan keuangan yang ada di BMT.

## E. Kajian Pustaka

Kajian pustaka merupakan suatu deskripsi yang ada hubungannya antara masalah yang diteliti dengan masalah terdahulu, dimana masalah tersebut sejenis dan relevan. Dimana yang dimaksud relevan adalah penelitian atau kajian tersebut ada hubungannya.<sup>10</sup> Kajian pustaka berfungsi untuk menjelaskan bahwa tema yang akan diteliti belum diteliti orang lain, selain itu juga harus menghindari adanya duplikasi hasil penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya, maka dalam kajian pustaka ada beberapa hasil yang dikaji dari

---

<sup>10</sup> Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, *Pedoman Penulisan Skripsi*, (Yogyakarta: Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2014), hlm. 16.

penelitian terdahulu yang memiliki relevansi dengan penelitian ini, diantaranya yaitu:

1. Skripsi yang ditulis Khofiya Nida dengan judul *Sistem Pengawasan Keuangan Poliklinik UIN Sunan Kalijaga (Tahun 2013-2014)*. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Klinik Pratama UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta telah melakukan sistem pengawasan keuangan pada tahun 2013-2014 dengan baik. Proses pengawasan dilakukan dengan menerapkan lima langkah pengawasan, yaitu penetapan standar pelaksanaan, penentuan pengukuran pelaksanaan kegiatan, pengukuran pelaksanaan kegiatan, perbandingan pelaksanaan dengan standar, dan pengambilan tindakan koreksi jika perlu. Sedangkan laporan keuangan yang digunakan hanyalah laporan yang sesuai dengan pihak pusat UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.<sup>11</sup> Kesamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan adalah sama-sama bertujuan untuk mengetahui bagaimana sistem pengawasan keuangan di suatu lembaga, dan juga sama-sama menggunakan metode penelitian kualitatif. Sedangkan perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan terletak pada subjek penelitian. Subjek penelitian pada penelitian yang dilakukan adalah sistem pengawasan keuangan yang ada di BMT BIF Kantor Pusat Rejowinangun Yogyakarta. Sedangkan penelitian ini subjeknya adalah sistem pengawasan keuangan yang ada di Poliklinik UIN Sunan Kalijaga.

---

<sup>11</sup> Khofiya Nida, "Sistem Pengawasan Keuangan Poliklinik UIN Sunan Kalijaga (Tahun 2013-2014)", *Skripsi*, (Yogyakarta: Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga, 2016), hlm. 120-121.



2. Jurnal Ilmu Ekonomi Islam, Vol. 2, No. 1, Desember 2018 yang ditulis Slamet Mujiono dengan judul *Urgensi Regulasi Pengawasan Baitul Wat Tanzil (BMT) di Indonesia*. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sampai saat ini pengawasan terhadap BMT belum berjalan efektif dan berdampak pada sistem pengawasan BMT. Masih ada beberapa permasalahan dalam sistem pengawasan yang dilakukan oleh DPS, OJK, Koperasi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten dan Kota, yang masih kurang efektif, yaitu Undang-Undang No. 1 tahun 2013 tentang lembaga keuangan mikro belum disertai peraturan Pemerintah dan Hukum Materiil yang memadai sebagai regulasi melaksanakan Undang-Undang, sehingga tidak ada sistem pengawasan yang detail, dan konprehensif untuk mengukung sistem pengawasan lembaga keuangan mikro yang profesional.<sup>12</sup> Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan yaitu pada penelitian ini berfokus pada urgensi regulasi pengawasan Baitul Wat Tanzil (BMT) di Indonesia. Sedangkan penelitian yang dilakukan akan berfokus pada sistem pengawasan keuangan yang ada di BMT BIF Kantor Pusat Rejowinangun Yogyakarta.
3. Skripsi yang ditulis Thoriq Almunawir Taufik dengan judul *Manajemen Pengawasan pada Kelompok Bimbingan Ibadah Haji (KBIH) oleh Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bantul Yogyakarta Tahun 2018*. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa manajemen pengawasan pada Kelompok Bimbingan Ibadah Haji (KBIH) oleh Kantor Kementerian

---

<sup>12</sup> Slamet Mujiono, "Urgensi Regulasi Pengawasan Baitul Wat Tanzil (BMT),... hlm. 74.

Agama Kabupaten Bantul sudah dilaksanakan dengan baik dan benar, sesuai dengan prosedur dan arahan. Hal ini dapat dilihat dengan adanya kegiatan perencanaan pengawasan, pengorganisasian, pelaksanaan pengawasan, laporan dan evaluasi setelah semua kegiatan dilaksanakan.<sup>13</sup>

Kesamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan adalah sama-sama menggunakan metode penelitian kualitatif. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan yaitu pada penelitian ini berfokus pada manajemen pengawasan pada kelompok KBIH oleh kementerian agama Bantul. Sedangkan penelitian yang dilakukan akan berfokus pada sistem pengawasan keuangan yang ada di BMT BIF Kantor Pusat Rejowinangun Yogyakarta.

4. Skripsi yang ditulis Mahatva Citra Kusuma dengan judul *Pengawasan Penggunaan Anggaran Keuangan di Yayasan Pondok Pesantren Modern Yatim dan Dhuafa Madania Banguntapan, Bantul*. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengawasan penggunaan anggaran keuangan di Yayasan Pondok Pesantren Modern Yatim dan Dhuafa Madania Bantul, belum berjalan dengan baik. Pengawasan secara internal telah berjalan dengan baik dan struktur. Namun, pengawasan secara eksternal sampai saat ini juga belum ada peninjauan atau pengawasan secara langsung.<sup>14</sup>

---

<sup>13</sup> Thoriq Almunawir Taufik, "Manajemen Pengawasan pada Kelompok Bimbingan Ibadah Haji (KBIH) oleh Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bantul Yogyakarta Tahun 2018", *Skripsi*, (Yogyakarta: Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga, 2020), hlm. 44.

<sup>14</sup> Mahatva Citra Kusuma, "Pengawasan Penggunaan Anggaran Keuangan di Yayasan Pondok Pesantren Modern Yatim dan Dhuafa Madania Banguntapan, Bantul", *Skripsi*, (Yogyakarta: Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga, 2020), hlm. 88.

Kesamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan adalah sama-sama menggunakan metode penelitian kualitatif. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan yaitu pada penelitian ini berfokus pada pengawasan anggaran keuangan di Yayasan Pondok Pesantren Modern Yatim dan Dhuafa Madania Bantul. Sedangkan penelitian yang dilakukan akan berfokus pada sistem pengawasan keuangan yang ada di BMT BIF Kantor Pusat Rejowinangun Yogyakarta.

Berdasarkan kajian pustaka di atas, maka peneliti yang secara khusus membahas tentang sistem pengawasan keuangan di BMT BIF Kantor Pusat Rejowinangun Yogyakarta belum pernah diteliti oleh peneliti sebelumnya.

#### **F. Kerangka Teori**

Kerangka teori merupakan kerangka konseptual atau konsep teoritis yang digunakan oleh peneliti dalam mengkaji permasalahan dalam penelitian. Kerangka teori berfungsi sebagai dasar peneliti untuk melakukan analisis terhadap masalah utama dalam penelitian.<sup>15</sup> Dengan demikian, alur yang digunakan oleh peneliti harus sesuai dengan teori yang digunakan. Kerangka teori dalam penelitian ini yaitu:

---

<sup>15</sup> *Ibid.*, hlm. 16-17.

## 1. Tinjauan Umum Tentang Sistem Pengawasan

### a. Pengertian sistem pengawasan

Sistem merupakan suatu kumpulan kesatuan dan perangkat hubungan antara satu dengan yang lainnya. Sistem sendiri memiliki beberapa kriteria, diantaranya yaitu:

- 1) Sistem dirancang untuk mencapai tujuan.
- 2) Elemen dari sistem harus mempunyai rencana yang ditetapkan.
- 3) Elemen dalam sistem harus berhubungan dan berkaitan, umumnya dalam pencapaian tujuan organisasi, dan khususnya dalam tujuan divisi maupun departemen.
- 4) Unsur dasar dari proses.
- 5) Tujuan organisasi lebih penting dibandingkan dengan tujuan divisi maupun tujuan departemen.<sup>16</sup>

Pengawasan merupakan salah satu fungsi dalam manajemen suatu organisasi. Dimana pengawasan memiliki arti suatu proses mengawasi dan mengevaluasi suatu kegiatan. Pengawasan juga diartikan sebagai suatu upaya yang sistematis untuk menetapkan kinerja standar pada perencanaan dalam merancang sistem umpan balik informasi, untuk membandingkan kinerja aktual dengan standar yang telah ditentukan, untuk menetapkan apakah telah terjadi suatu penyimpangan atau tidak, dan juga untuk mengambil tindakan

---

<sup>16</sup> Thomas Sunarsan, *Sistem Pengendalian Manajemen Konsep, Aplikasi, dan Pengukuran Kinerja*, (Jakarta: Indeks, 2013), hlm. 2.

perbaikan yang diperlukan untuk menjamin bahwa semua sumber daya perusahaan atau pemerintahan telah digunakan seefektif dan seefisien mungkin guna mencapai tujuan perusahaan atau pemerintahan tersebut. Dari beberapa pendapat tersebut dapat ditarik kesimpulan, bahwa pengawasan merupakan suatu hal yang sangat penting untuk melakukan suatu perencanaan.<sup>17</sup> Menurut Fahmi yang dikutip oleh Erlis Milta Rin Sondole dkk, pengawasan didefinisikan sebagai suatu cara yang digunakan oleh organisasi untuk mewujudkan kinerja yang efektif, efisien, dan mendukung terwujudnya visi dan misi organisasi.<sup>18</sup> Dengan adanya pengawasan maka perencanaan yang diharapkan oleh manajemen dapat terpenuhi dan berjalan dengan baik.

Pengawasan dalam pandangan Islam dilakukan dengan adanya tujuan yang baik, dimana pengawasan tersebut dilakukan untuk meluruskan yang tidak lurus, mengoreksi yang salah, dan membenarkan sesuatu yang hak (membenarkan kebenaran).<sup>19</sup>

Pengawasan (*control*) dalam ajaran Islam (hukum syariah) terdiri dari dua hal, yaitu kontrol yang berasal dari diri sendiri yang bersumber dari tauhid dan keimanan kepada Allah SWT, sedangkan yang kedua yakni

---

<sup>17</sup> Rahardjo Adisasmito, *Pengelolaan Pendapatan & Anggaran Daerah*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011), hlm. 63.

<sup>18</sup> Erlis Milta Rin Sondole dkk, "Pengaruh Disiplin Kerja, Motivasi, dan Pengawasan terhadap Kinerja Karyawan pada PT. Pertamina (Persero) Unit Pemasaran VII Pertamina BBM Bitung", *Jurnal EMBA*, Vol. 3, hlm. 652.

<sup>19</sup> Abdul Mannan, *Membangun Islam Kaffah*, (Jakarta: Madina Pustaka, 2000), hlm. 152.

sebuah pengawasan dari luar (sistem atau publik).<sup>20</sup> Sehingga pengawasan dapat dikatakan penting karena tanpa adanya pengawasan yang baik tentunya akan menghasilkan tujuan yang kurang memuaskan.

Pengawasan mempunyai tujuan supaya apa yang direncanakan menjadi kenyataan. Tujuan pengawasan yaitu, mengamati apa yang sebenarnya terjadi dan membandingkan dengan apa yang seharusnya terjadi, dengan maksud untuk secepatnya melaporkan kepada pimpinan yang bersangkutan untuk diambil tindakan korektif. Tujuan utama dari pengawasan yaitu untuk memahami apa yang salah demi perbaikan dimasa yang akan datang sehingga dapat mendapatkan hasil yang lebih maksimal.<sup>21</sup> Sistem pengawasan merupakan cara untuk mengamati, memantau, dan mengidentifikasi objek tertentu, yang berkaitan erat dengan keamanan.

b. Tahap-tahap dalam proses pengawasan

Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam kaitannya dengan proses pengawasan, menurut T. Hani Handoko proses pengawasan terdiri dari:

1) Penetapan standar pelaksanaan (perencanaan).

Tahap pertama dalam pengawasan yaitu penetapan standar pelaksanaan atau yang disebut dengan perencanaan. Perencanaan

---

<sup>20</sup> Didin Hafifudhin dan Hendri Tanjung, *Manajemen Syariah dalam Praktek*, (Jakarta: Gema Insani, 2003), hlm. 156.

<sup>21</sup> Bohari, *Pengawasan Keuangan Negara*, (Jakarta: Rajawali, 1992), hlm. 4.

merupakan proses dasar dimana manajemen memutuskan tujuan dan cara untuk mencapai tujuan tersebut. Menurut T. Hani Handoko standar perencanaan yang umum digunakan dalam manajemen meliputi tiga bentuk, yaitu:

a) Standar fisik

Standar fisik mungkin meliputi kuantitas barang atau jasa, jumlah langganan, atau kualitas produk.

b) Standar moneter

Standar moneter yaitu yang ditunjukkan dalam rupiah dan mencakup biaya tenaga kerja, biaya penjualan, laba kotor, pendapatan penjualan, dan sejenisnya.

c) Standar waktu

Standar waktu meliputi kecepatan produksi atau batas waktu suatu pekerjaan harus diselesaikan.

2) Penentuan pengukuran pelaksanaan kegiatan.

Setelah penetapan standar pelaksanaan atau perencanaan dilakukan, langkah ke-dua dalam tahap proses pengawasan laporan keuangan yaitu penentuan pengukuran pelaksanaan kegiatan. Karena penetapan standar akan sia-sia bila tidak disertai berbagai cara untuk mengukur pelaksanaan kegiatan nyata.

3) Pengukuran pelaksanaan kegiatan nyata.

Pengukuran pelaksanaan kegiatan nyata dilakukan sebagai proses yang berulang-ulang dan terus-menerus. Ada beberapa cara

yang dapat digunakan untuk melakukan pengukuran pelaksanaan, yaitu pengamatan (observasi), dan laporan-laporan baik lisan maupun tertulis.

- 4) Perbandingan pelaksanaan kegiatan dengan standar dan penganalisisan penyimpangan-penyimpangan.

Tahap kritis dari proses pengawasan yaitu perbandingan pelaksanaan nyata dengan standar yang telah ditetapkan. Walaupun tahap ini sangat mudah untuk dilakukan, namun kompleksitas dapat terjadi pada saat menginterpretasikan adanya penyimpangan atau deviasi.

- 5) Pengambilan tindakan koreksi jika perlu.

Pengambilan tindakan koreksi merupakan tahap akhir dalam pengawasan.<sup>22</sup> Bila hasil analisis menunjukkan perlunya tindakan koreksi, maka tindakan ini harus diambil.

Sistem pengawasan harus dilaksanakan dengan semaksimal mungkin, karena tanpa adanya sistem atau proses pengawasan yang baik tentunya akan menghasilkan tujuan yang kurang memuaskan.

#### c. Bentuk-bentuk pengawasan

- 1) Pengawasan internal

Pengawasan internal merupakan pengawasan dari dalam organisasi, yang berarti pengawasan yang dilakukan oleh aparat atau unit pengawasan yang dibentuk dalam organisasi itu sendiri.

---

<sup>22</sup> T. Hani Handoko, *Manajemen*, (Yogyakarta: BPFE, 2015), hlm. 361-363.



Aparat atau unit pengawasan ini bertindak atas nama pimpinan organisasi, dan bertugas mengumpulkan segala data maupun informasi yang diperlukan oleh organisasi. Hasil pengawasan ini dapat digunakan dalam nilai kebijaksanaan pimpinan, dimana kadang-kadang pimpinan perlu meninjau kembali kebijaksanaan atau keputusan yang telah ditetapkan, sehingga pimpinan dapat melakukan tindakan perbaikan terhadap pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh bawahannya.<sup>23</sup>

Pengawasan internal memiliki maksud dan tujuan, yaitu untuk menjaga kekayaan organisasi, mengecek ketelitian dan dapat dipercayanya data akuntansi, mendorong efisiensi, dan mendorong dipatuhinya kebijaksanaan manajemen. Pengawasan suatu organisasi atau lembaga dapat berjalan dengan efektif dan efisien maka dibutuhkan yang namanya pengelolaan, khususnya dari segi akuntansi, yang terdiri dari:

- a) Struktur organisasi yang baik
- b) Sistem otorisasi dan tanggungjawab yang jelas
- c) Struktur akuntansi yang baik
- d) Kebijakan personalia yang baik
- e) Adanya badan atau staf internal auditor

---

<sup>23</sup> Maringan Masry Simbolon, *Dasar-Dasar Administrasi dan Manajemen*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2004), hlm. 62.

f) Dewan Pengawasan (Komisaris) yang kompeten dan aktif.<sup>24</sup>

## 2) Pengawasan eksternal

Pengawasan eksternal merupakan pengawasan yang dilakukan oleh aparat atau unit pengawasan dari luar organisasi tersebut. Aparat atau unit pengawasan dari luar organisasi itu adalah pengawasan yang bertindak atas nama atasan pimpinan organisasi itu, atau bertindak atas nama pimpinan organisasi itu karena permintaannya.<sup>25</sup> Pengawasan eksternal dapat diartikan juga pengawasan yang dilakukan oleh pihak luar secara struktural, yang biasanya dilakukan oleh pimpinan ditingkat lebih tinggi.<sup>26</sup>

Pimpinan organisasi dapat pula meminta bantuan pihak luar untuk melakukan pengawasan atau pemeriksaan dengan maksud tertentu, misalnya untuk mengetahui efisiensi kerjanya, jumlah keuntungan, dan yang lainnya.

## d. Pengertian keuangan

Keuangan merupakan segala sesuatu yang berkaitan dengan uang, seluk beluk uang, urusan uang, keadaan uang, atau apapun tentang uang. Ada pendapat lain mengenai keuangan, yakni menurut Ridwan dan Inge yang dikutip oleh Khofiya Nida, keuangan merupakan

---

<sup>24</sup> Vincent Gospers, *Perencanaan Strategik untuk Peningkatan Kinerja Sektor Publik suatu Petunjuk Praktik*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Umum, 2004), hlm. 2.

<sup>25</sup> *Ibid.*, hlm. 64.

<sup>26</sup> Ahmad Susanto, *Konsep, Strategi, dan Implementasi Manajemen Peningkatan Kinerja Guru*, (Jakarta: Prenada Media, 2016), hlm. 236.

ilmu dan seni untuk mengelola uang dimana dapat mempengaruhi kehidupan setiap orang maupun organisasi. Keuangan berhubungan dengan pasar, instrumen, proses, dan lembaga apapun yang terlibat dalam pemindahan uang atau transfer, baik antar individu/ perorangan, bisnis, maupun pemerintah.<sup>27</sup> Dapat kita ketahui bahwa keuangan pasti berhubungan erat dengan dunia moneter, khususnya uang. Uang merupakan alat penting yang harus kita miliki dalam melakukan transaksi apapun.

Keuangan juga dapat diartikan sebagai manajemen keuangan. Manajemen keuangan merupakan salah satu bidang fungsional dalam suatu bidang fungsional lainnya, seperti pemasaran, produksi, dan sumber daya manusia.<sup>28</sup> Manajemen keuangan diartikan juga sebagai aktivitas pemilik dan manajemen perusahaan untuk memperoleh sumber modal. Jadi pengelolaan atau manajemen keuangan adalah istilah untuk menyebut seluruh aktivitas yang bersangkutan dengan urusan keuangan.

e. Laporan keuangan

Laporan keuangan merupakan hasil akhir dari siklus akuntansi yang memberikan gambaran keuangan tentang suatu perusahaan yang secara periodik disusun oleh manajemen perusahaan. Laporan

---

<sup>27</sup> Khofiya Nida, "Sistem Pengawasan Keuangan Poliklinik,... hlm. 15-16.

<sup>28</sup> I Made Sudana, *Manajemen Keuangan Teori dan Praktik*, (Surabaya: Airlangga University Press, 2009), hlm. 1.

keuangan dalam perusahaan sangatlah penting, sehingga dirancang dengan sedemikian rupa supaya dapat digunakan oleh pihak yang berkepentingan. Pihak yang berkepentingan tersebut yakni pihak internal dan eksternal perusahaan. Pihak internal terdiri dari karyawan dan manajemen perusahaan, sedangkan pihak eksternal yaitu kreditur, pemasok, penanam modal calon penanam modal, dan badan pemerintah.<sup>29</sup> Masing-masing pihak dari pihak internal maupun eksternal tersebut mempunyai kepentingan yang berbeda-beda.

Penyajian laporan keuangan mempunyai tujuan untuk memberikan informasi kuantitatif mengenai kondisi dan posisi keuangan perusahaan, untuk membantu kepentingan karyawan maupun manajemen, untuk mengetahui pencapaian kinerja perusahaan sehingga pihak manajemen dapat menentukan keputusan yang akan diambil, selain itu untuk menentukan besarnya persentase kenaikan gaji dan bonus yang akan diterima.<sup>30</sup> Itulah beberapa tujuan adanya laporan keuangan dalam perusahaan.

Penyusunan laporan keuangan harus berdasarkan pada standar akuntansi keuangan yang berlaku di Indonesia, atau berdasarkan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum yang digunakan untuk menyusun laporan keuangan, prinsip-prinsip tersebut yaitu:

---

<sup>29</sup> Thomas Sunarsan, *Sistem Pengendalian Manajemen*, ... hlm. 35.

<sup>30</sup> *Ibid.*, hlm. 36.

- 1) Suatu kesatuan (*one entity*) yang berarti perusahaan didirikan harus satu persatuan, dalam menyusun laporan keuangan dipisahkan antara harta pribadi dan harta perusahaan.
- 2) Kelangsungan hidup (*going concern*) yang berarti perusahaan didirikan dengan jangka waktu yang tidak ditentukan atau tidak ada batasnya.
- 3) Dapat diperbandingkan (*comparability*) dimana laporan keuangan yang disusun dapat dibandingkan dengan laporan keuangan masa yang berbeda, maupun dengan laporan keuangan perusahaan lain yang sejenis.
- 4) Konsisten (*consistent*) yang berarti dalam penyusunan laporan keuangan harus taat/ konsisten sehingga memberikan gambaran laba yang dapat dianalisis.
- 5) Tepat waktu (*timeliness*) dimana laporan keuangan harus selesai dengan tepat waktu.<sup>31</sup>

Selain prinsip-prinsip dalam penyusunan laporan keuangan, terdapat beberapa macam-macam pengawasan keuangan yang paling berguna dalam pengawasan hasil secara menyeluruh, diantaranya yaitu:

- 1) Neraca (*balance*)

Neraca atau *balance sheet* adalah laporan keuangan yang menggambar posisi keuangan perusahaan pada suatu saat. Neraca biasanya disajikan tiap akhir tahun, pertengahan tahun, atau

---

<sup>31</sup> *Ibid.*, hlm.37.

kuartal pertama. Neraca perusahaan dibentuk dari persamaan akuntansi yaitu harta (*asset*) = hutang (*liabilities*) + modal (*equity*). Bagian pertama neraca yaitu harta-harta perusahaan ada harta lancar dan harta tetap, untuk bagian kedua berisi kewajiban atau hutang. Unsur yang berkaitan langsung dengan pengukuran posisi keuangan yaitu aktiva, kewajiban, dan ekuitas.<sup>32</sup> Neraca sangat penting bagi perusahaan, karena neraca digunakan untuk mengetahui posisi keuangan yang ada di perusahaan tersebut. Jika tidak ada laporan neraca dapat dipastikan pencatatan keuangan yang ada di perusahaan tersebut tidak rapi, bahkan laba, rugi, debit dan kredit tidak dapat dipastikan.

2) Laporan laba rugi (*profit and loss statement*)

Laporan laba-rugi adalah laporan keuangan yang memberikan informasi tentang hasil akhir perusahaan selama periode tertentu. Penghasilan bersih (laba) seringkali digunakan sebagai ukuran kinerja atau sebagai dasar bagi ukuran yang lain, seperti imbalan investasi, atau penghasilan per saham.<sup>33</sup> Laporan laba-rugi menjadi salah satu laporan penting yang perlu untuk diperhatikan, karena dengan adanya laporan laba-rugi maka perusahaan bisa mengetahui pendapatan, pengeluaran, serta laba dan rugi yang diperolehnya dalam kurun waktu tertentu

---

<sup>32</sup> Najmudin, *Manajemen Keuangan dan Aktualisasi Syar'iyah Modern*, (Yogyakarta: ANDI, 2011), hlm. 69.

<sup>33</sup> *Ibid.*, hlm. 71.

Dari paparan diatas dapat diketahui bahwa laporan keuangan itu sangat penting, karena menjadi dasar untuk menentukan atau menilai posisi perusahaan. Proses dalam penyusunan laporan keuangan dilakukan berdasarkan hubungan, dimana antara laporan laba rugi, laporan-laporan khusus, dan neraca ketiganya saling berhubungan, sehingga butuh ketelitian dalam proses laporan keuangan.

## 2. Tinjauan Umum Tentang Baitul Maal Wa Tamwil (BMT)

### a. Pengertian BMT

BMT merupakan kependekan dari *Baitul Maal wa Tamwil*, *baitul maal* berarti rumah dana dan *baitul tanwil* berarti rumah usaha, yang merupakan organisasi bisnis dan juga berperan sosial. Peran sosial BMT akan terlihat pada definisi *baitul maal*, sedangkan peran bisnisnya terlihat pada definisi *baitul tanwil*. Sebagai lembaga sosial, *baitul maal* memiliki kesamaan fungsi dan peran dengan Lembaga Amil Zakat (LAZ), fungsi tersebut paling tidak meliputi upaya pengumpulan dana zakat, infaq, sedekah, wakaf, dan sumber dana sosial yang lainnya, serta upaya pencyarufan zakat kepada golongan yang paling berhak sesuai dengan ketentuan ashabiah (UU Nomor 38 tahun 1999). Sebagai lembaga bisnis, BMT lebih mengembangkan usahanya pada sektor keuangan, yakni simpan-pinjam. Usaha ini semacam perbankan dengan menghimpun dana anggota dan calon anggota (nasabah) serta menyalurkan dananya kepada sektor ekonomi yang halal dan

menguntungkan.<sup>34</sup> Badan hukum BMT yakni koperasi, bukan bank, sehingga berhak mengembangkan bisnisnya yang dilarang dalam perbankan atau boleh tidak tunduk pada peraturan yang diterapkan terhadap perbankan.

b. Tujuan BMT

BMT didirikan dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas usaha ekonomi demi kesejahteraan anggota khususnya dan masyarakat pada umumnya.<sup>35</sup> Dapat diketahui bahwa BMT berupaya untuk meningkatkan kesejahteraan anggota dan masyarakat dengan membantu pelaku usaha mikro dan masyarakat yang membutuhkan modal untuk meningkatkan usaha dan mengembangkan usaha mereka.

c. Landasan BMT

Dalam ekonomi Indonesia, BMT dikategorikan dalam koperasi syariah, yaitu lembaga ekonomi yang memiliki fungsi untuk menarik, mengelola, dan menyalurkan dana. BMT sebagai swadaya ekonomi umat karena dibentuk dari, oleh dan untuk masyarakat. BMT didirikan dalam bentuk Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) atau disebut juga koperasi.

---

<sup>34</sup> Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitu Maal wa Tamwil (BMT)*, (Yogyakarta: UII Press Yogyakarta, 2004), hlm. 126.

<sup>35</sup> *Ibid.*, hlm. 128.



- 1) Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) mendapatkan surat keterangan operasional dan PINBUK (Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil).
- 2) Koperasi serba usaha atau koperasi yang syariah'ah.
- 3) Koperasi Simpan Pinjam Syariah (KSP-P).

Sebelum melakukan usahanya KSM harus mendapatkan sertifikat operasi dari PINBUK, sedangkan PINBUK harus mendapat pengakuan dari Bank Indonesia. Selain dengan KSM, BMT dapat didirikan dengan menggunakan badan hukum koperasi.<sup>36</sup> Karena badan hukum yang memayungi BMT hingga saat ini adalah koperasi, hal ini berarti kelembagaan BMT harus tunduk pada Undang-Undang Perkoperasian Nomor 17 tahun 2012 dan diatur dalam Keputusan Menteri Negara Koperasi (Kemenkop) dan UKM RI Nomor 91/Kep/M.KUKM/IX/2004 tentang petunjuk pelaksanaan kegiatan dari Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS).<sup>37</sup> Selain itu BMT harus tunduk kepada Peraturan Menteri Negara (Permeneg) Koperasi dan UKM RI Nomor.39/Per/M.KUKM/XII/2007 tentang Pedoman Pengawasan Koperasi Jasa Keuangan Syariah dan Unit Jasa Keuangan

---

<sup>36</sup> Ahmad Hasan Ridwan, *Manajemen Baitul Mal wa Tamwil*, (Bandung: Pustaka Setia, 2013), hlm. 26.

<sup>37</sup> Sri Lestari, "Penyelesaian Sengketa Pembiayaan Macet pada Akad Murabahah di BMT Hubbul Wathon Sumowono", *Skripsi*, (Salatiga: Fakultas Syariah IAIN Salatiga, 2015), hlm. 45-46.

Syariah.<sup>38</sup> Dapat diketahui bahwa BMT harus tunduk kepada peraturan-peraturan yang telah ditetapkan.

d. Fungsi BMT

Dalam rangka untuk mencapai tujuannya, BMT memiliki beberapa fungsi yaitu:

- 1) Mengidentifikasi, mengorganisasi, mendorong dan mengembangkan kemampuan potensi ekonomi anggota, kelompok anggota muamalat dan daerah kerjanya.
- 2) Meningkatkan kualitas SDM anggota menjadi lebih profesional dan islami, supaya semakin utuh dan tangguh, supaya mampu dalam menghadapi persaingan global.
- 3) Menggalang dan memobilisasi potensi masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan anggota.
- 4) Menjadi perantara keuangan, antara agniya sebagai shohibul maal dengan du'afa sebagai mudhorib, terutama untuk dana-dana sosial seperti zakat, infaq, sedekah, wakaf, hibah, dan yang lainnya.
- 5) Menjadi perantara keuangan, antara pemilik dana (*shihubul maal*), baik sebagai pemodal maupun penyimpan dengan pengguna dana (*mudhorib*) untuk pengembangan usaha produktif.<sup>39</sup>

---

<sup>38</sup> Thalís Noor Cahyadi, "Baitul Maal wat Tamwil Legalitas dan Pengawasannya", *Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia*, Vol. II, No. 2, 2012, hlm. 177.

<sup>39</sup> *Ibid.*, hlm. 131.

### 3. Sistem Pengawasan Keuangan pada Baitul Maal Wa Tamwil (BMT)

#### a. Tujuan pengawasan keuangan pada BMT

Lembaga BMT memerlukan aturan pengawasan terhadap keuangan, pengawasan diperlukan untuk menegakkan kepatuhan dan kehati-hatian untuk selalu menjaga kesehatan lembaga keuangan mikro, untuk melindungi dari hilangnya uang atau menghindari kerugian. Alasan lain mengapa pengawasan dalam sebuah lembaga keuangan mikro seperti BMT itu sangat penting karena lembaga keuangan memerlukan pembinaan yang berbeda dengan lembaga keuangan perbankan, walaupun dalam prakteknya lembaga keuangan mikro menggunakan fungsi perbankan.<sup>40</sup>

Secara umum terdapat alasan mengenai pentingnya pengaturan dan pengawasan terhadap BMT, diantaranya yaitu:

- 1) BMT berposisi penting sebagai sistem keuangan.
- 2) Potensi terjadinya suatu permasalahan akibat kegagalan usaha BMT.
- 3) Operasional dari kegiatan usaha BMT sebagai bank dimana hampir seluruh asetnya berbentuk likuid dan tingkat kewajiban keuangan yang sangat tinggi.

---

<sup>40</sup> Slamet Mujiono, "Urgensi Regulasi Pengawasan Baitul Wat Tanzil (BMT),... hlm. 81.

- 4) Adanya situasi ketidakmampuan nasabah untuk monitor secara terus menerus. Jadi pelaksanaan pengaturan dan pengawasan BMT untuk menjaga stabilitas sistem keuangan.<sup>41</sup>

Pengawasan keuangan dalam sebuah lembaga salah satunya yakni lembaga BMT sangat penting untuk dilakukan sesuai dengan sistem yang sebaik mungkin. BMT merupakan sebuah lembaga keuangan mikro syariah dimana seluruh kegiatannya sesuai dengan prinsip Islam, sehingga pengawasan terhadap keuangan juga harus dipertanggung-jawabkan dengan sebaik mungkin.

b. Proses pengawasan keuangan pada BMT

BMT merupakan sebuah lembaga keuangan mikro syariah yang berbentuk koperasi, dimana seluruh kegiatannya sesuai dengan prinsip Islam. Pengawasan dalam BMT dilakukan dengan dua model yakni pengawasan internal dan eksternal. Pengawasan internal dilakukan oleh dewan pengawas dan Dewan Pengawas Syariah (DPS). Sedangkan pengawasan eksternal dilakukan oleh instansi pemerintahan terkait.<sup>42</sup>

Pengurus dalam lembaga BMT telah menunjuk pengelola dalam menjalankan operasional rutin, dimana fungsi pengurus yang terpenting terletak pada fungsi pengawasan. Dalam lembaga BMT terdapat Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang mempunyai tugas untuk melakukan pengawasan terhadap BMT, terutama mengenai sistem syariah yang

---

<sup>41</sup> *Ibid.*, hlm.81.

<sup>42</sup> Thalib Noor Cahyadi, "Baitul Maal wat Tamwil Legalitas dan,... hlm. 173.

dijalankan. Landasan kerja yang digunakan oleh DPS berdasarkan dengan fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN), terdapat beberapa fungsi mengenai pengawasan, yaitu:

- 1) Sebagai penasihat untuk memberikan saran kepada pengurus dan pengelola mengenai hal-hal yang terkait dengan syariah, contohnya yaitu produk.
- 2) Sebagai mediator antara BMT dengan Dewan Pengawas Syariah (DPS) Provinsi, maupun Dewan Syariah Nasional (DSN)
- 3) Sebagai perwakilan anggota dalam pengawasan syariah.

Dewan Pengawas Syariah (DPS) merupakan bagian dari Dewan Syariah Nasional (DSN). Sehingga fatwa DSN menjadi bagian dari pengawasan syariah oleh DPS. Pada dasarnya yang mempunyai wewenang untuk merumuskan fatwa mengenai sistem keuangan syariah adalah DSN.<sup>43</sup> Dapat kita ketahui bahwa DPS hanya sebagai pelaksana atas fatwa DSN, karena yang mempunyai wewenang yakni DSN.

Pengawasan internal bertujuan untuk melindungi kekayaan perusahaan, memeriksa kecermatan data akuntansi, meningkatkan efisiensi operasi usaha, dan mendorong untuk mentaati kebijakan yang telah ditetapkan. Berikut ada beberapa ruang lingkup pengawasan internal, yaitu:

---

<sup>43</sup> Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitu Maal wa Tamwil*, ... hlm. 142-143.

- 1) Penilaian mengenai kelayakan dan kecukupan pengendalian dibidang keuangan, pembiayaan, dan kegiatan koperasi.
- 2) Pemeriksaan mengenai kebijakan, rencana, dan prosedur, untuk memastikan bahwa benar-benar ditaati atau tidak.
- 3) Pemeriksaan untuk memastikan bahwa semua harta milik koperasi dipertanggungjawabkan dan dijaga dari kerugian.
- 4) Pemeriksaan untuk memastikan bahwa data informasi yang disajikan dapat dipercaya.
- 5) Penilaian terhadap kualitas pelaksanaan setiap unit kerja dalam melaksanakan tanggungjawabnya.
- 6) Memberikan masukan atau rekomendasi yang berkaitan dengan perbaikan dibidang operasi, pembiayaan, maupun yang lainnya.<sup>44</sup>

BMT yang berbadan hukum Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) untuk sistem pengawasan eksternalnya tunduk kepada Peraturan Menteri Negara (Permeneg) Koperasi dan UKM RI Nomor.39/Per/M.KUKM/XII/2007 tentang Pedoman Pengawasan Koperasi Jasa Keuangan Syariah dan Unit Jasa Keuangan Syariah. Pada proses pengawasan KJKS/UJKS, pemerintah melalui Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) mengangkat pejabat pengawas yang berperan sebagai pengawas KJKS/UJKS yang mempunyai wewenang sebagai berikut:

---

<sup>44</sup> Thalib Noor Cahyadi, "Baitul Maal wat Tamwil Legalitas dan, ... hlm. 173-174.

- 1) Menerima laporan mengenai kondisi organisasi, usaha, dan permodalan untuk KJKS/UJKS.
- 2) Melakukan audit atau bisa meminta tolong kepada auditor independen untuk melakukan audit terhadap semua dana, surat-surat berharga, pembukuan, kertas kerja, dan laporan pemeriksaan oleh pengawas yang akan diberikan kepada pengurus KJKS/UJKS.
- 3) Merekomendasikan kepada Menteri untuk mencabut atau memberhentikan izin usaha terhadap Jasa Keuangan Syariah apabila terdapat bukti yang kuat dimana KJKS/UJKS telah menjalankan usaha keuangan yang tidak sehat dan aman, selain itu juga apabila melanggar peraturan hukum yang berlaku.
- 4) Mengeluarkan perintah untuk KJKS/UJKS dalam pengawasan administratif.<sup>45</sup>

Lembaga yang telah diamanahi untuk menjadi pengawas terhadap BMT harus bertanggungjawab penuh atas tugasnya dalam melakukan pengawasan keuangan yang ada di BMT. Tanpa adanya sistem pengawasan keuangan yang baik, maka akan menghasilkan manajemen keuangan yang kurang optimal, sehingga tanggung jawab lembaga pengawasan keuangan BMT sangat dibutuhkan.

---

<sup>45</sup> *Ibid.*, hlm. 177.

## G. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan yang bersifat kualitatif, dimana data-datanya peneliti peroleh dari lapangan, baik data lisan maupun data tertulis (dokumen). Menurut Auerbach dan Silverstein sebagaimana dikutip Sugiyono, penelitian kualitatif adalah penelitian yang melakukan analisis, interpretasi teks dan hasil interview dengan tujuan untuk menemukan makna dari suatu fenomena. Sedangkan menurut Creswell sebagaimana dikutip Sugiyono, penelitian kualitatif adalah proses eksplorasi untuk memahami makna perilaku individu maupun kelompok, dan menggambarkan masalah sosial atau kemanusiaan.<sup>46</sup>

### 2. Tempat Penelitian

Penelitian tentang sistem pengawasan keuangan ini dilaksanakan di BMT BIF Kantor Pusat Rejowinangun Yogyakarta, yang beralamat di Jl. Rejowinangun No. 28B, Rejowinangun, Kec. Kotagede, Kota Yogyakarta, DIY, 55171 dan kegiatan penelitian ini akan dimulai sejak disahkannya proposal penelitian serta surat izin penelitian.

### 3. Ruang Lingkup Penelitian

#### a. Objek penelitian

Menurut Sugiyono objek penelitian adalah suatu atribut, sifat, nilai dari orang, objek atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu

---

<sup>46</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2018), hlm. 3-4.



yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.<sup>47</sup> Dengan demikian objek penelitian dalam penelitian ini adalah sistem pengawasan keuangan yang ada di BMT BIF Kantor Pusat Rejowinangun Yogyakarta.

b. Subjek penelitian

Subjek penelitian merupakan sesuatu yang dituju oleh peneliti supaya mendapatkan data. Menurut Suharsimi Arikunto subjek penelitian adalah tempat di mana data untuk variabel penelitian diperoleh.<sup>48</sup> Dapat diketahui bahwa yang dimaksud dengan subjek yaitu sesuatu baik itu orang, benda, maupun lembaga, yang sifat dan keadaannya akan diteliti.

Penelitian ini merupakan penelitian mengenai sistem pengawasan keuangan yang ada di BMT BIF Kantor Pusat Rejowinangun Yogyakarta, yang menjadi subjeknya adalah lembaga atau BMT BIF Kantor Pusat Rejowinangun Yogyakarta. Oleh karena itu, membutuhkan subjek atau narasumber (informan) yang paling banyak tahu sesuatu informasi (data) mengenai hal yang diteliti yang dapat peneliti pilih secara kolektif (satu kesatuan). Agar tujuan dan sasaran penelitian ini dapat tercapai, maka diperlukan narasumber yang memenuhi yang dapat mengungkap hal-hal atau informasi yang

---

<sup>47</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2013), hlm. 20.

<sup>48</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), hlm. 118.

dibutuhkan. Untuk mendapatkan informasi atau data maka dapat ditetapkan informan atau narasumber sebagai berikut:

- 1) Pengawas Manajemen BMT BIF Kantor Pusat Rejowinangun Yogyakarta.
- 2) Pengurus (Ketua dan Bendahara) BMT BIF Kantor Pusat Rejowinangun Yogyakarta.
- 3) Pegawai bagian Pembukuan BMT BIF Kantor Pusat Rejowinangun Yogyakarta.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar yang ditetapkan.<sup>49</sup>

Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data yang akan dilakukan oleh peneliti yaitu sebagai berikut:

##### a. Wawancara/ *interview*

Menurut Esterberg sebagaimana dikutip Sugiyono, yang dimaksud dengan wawancara/ *interview* adalah pertemuan antara dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat mengetahui makna dari suatu topik yang dibahasnya.

---

<sup>49</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif*,... hlm. 104.

Wawancara sendiri terdiri dari beberapa macam, ada wawancara terstruktur, semi terstruktur, dan tidak terstruktur.<sup>50</sup>

Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode wawancara semiterstruktur, dimana dalam pelaksanaannya lebih bebas jika dibandingkan dengan wawancara yang terstruktur. Tujuan dari wawancara jenis ini adalah untuk menemukan permasalahan secara lebih terbuka, di mana pihak yang diajak wawancara diminta pendapat, dan ide-idenya. Dalam melakukan wawancara, peneliti perlu mendengarkan secara teliti dan mencatat apa yang dikemukakan oleh informan.<sup>51</sup> Narasumber yang akan peneliti wawancarai yakni seperti pengawas manajemen dan pengawas syariah, pengurus dan pengelola, serta pegawai di BMT BIF Kantor Pusat Rejowinangun Yogyakarta.

b. Observasi

Menurut Nasution sebagaimana dikutip Sugiyono, observasi adalah dasar dari semua ilmu pengetahuan. Para ilmuwan hanya dapat bekerja berdasarkan data, yaitu fakta yang diperoleh melalui observasi. Data itu dikumpulkan dan disaring dengan bantuan berbagai alat yang sangat canggih, sehingga benda-benda yang sangat kecil maupun yang sangat jauh dapat diobservasi dengan jelas.<sup>52</sup>

---

<sup>50</sup> *Ibid.*, hlm. 114.

<sup>51</sup> *Ibid.*, hlm. 115-116.

<sup>52</sup> *Ibid.*, hlm. 106.

Observasi terdiri dari berbagai macam, namun peneliti akan melakukan pengumpulan data dengan observasi partisipatif. Peneliti terlibat dengan kegiatan yang telah dilakukan di lembaga, sehingga dapat merasakan suka maupun duka. Data yang diperolehpun akan lebih lengkap.

c. Dokumentasi

Dokumentasi dalam pengumpulan data yaitu catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen tersebut bisa berupa tulisan, gambar, atau karya-karya dari seseorang.<sup>53</sup> Dokumentasi ini digunakan peneliti untuk memperoleh data-data seperti buku, dokumen, data administrasi dan yang lainnya mengenai sistem pengawasan keuangan di BMT BIF Kantor Pusat Rejowinangun Yogyakarta, sehingga dapat memperkuat data yang disajikan oleh peneliti.

5. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan suatu proses untuk mencari dan menyusun secara sistematis dari data yang yang diperoleh, data tersebut bisa dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan mengelompokkan data sesuai dengan kategori, memilih mana yang penting dan tidak, kemudian membuat sebuah kesimpulan untuk mempermudah diri sendiri maupun orang lain dalam memahaminya.<sup>54</sup>

---

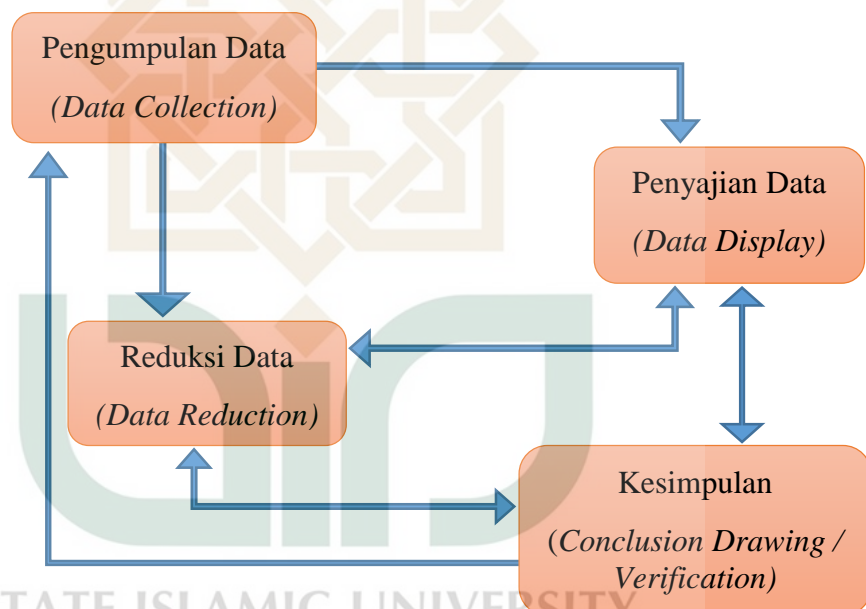
<sup>53</sup> *Ibid.*, hlm. 124.

<sup>54</sup> *Ibid.*, hlm. 131.

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif, dimana berusaha untuk mencari pola, model, tema, hubungan, persamaan, dan data yang dinyatakan dalam bentuk pernyataan-pernyataan, tafsiran-tafsiran setelah melakukan observasi, wawancara, dan menggali data dari beberapa narasumber/informan.

Gambar 1.1

## Komponen Analisis Data Model Miles dan Huberman



Menurut Miles dan Huberman kegiatan analisis terdiri dari empat unsur yaitu:

a. Pengumpulan data (*data collection*)

Kegiatan utama pada setiap penelitian adalah mengumpulkan data. Dalam penelitian kualitatif pengumpulan data dapat dilakukan dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Pengumpulan data tersebut dapat dilakukan dengan berhari-hari, bahkan juga berbulan-

bulan sehingga peneliti akan memperoleh data yang sangat banyak dan bervariasi.<sup>55</sup>

b. Reduksi data (*data reduction*)

Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstraksian, dan transformasi kata kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis dilapangan.<sup>56</sup> Reduksi data merupakan proses berfikir sensitif yang memerlukan kecerdasan, keluasan dan kedalaman wawasan yang tinggi.

c. Penyajian data (*data display*)

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah mendisplay data. Dalam penelitian kualitatif penyajian data merupakan sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Penyajian data kualitatif dapat dirancang dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowchart* dan sejenisnya. Dalam penelitian kualitatif yang paling sering digunakan untuk menyajikan data yakni dengan menggunakan teks yang bersifat naratif. Dengan mendisplay data, maka akan memudahkan peneliti

---

<sup>55</sup> *Ibid.*, hlm. 134.

<sup>56</sup> Satriani, “Strategi Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Utara”, *Skripsi*, (Makassar: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin, 2017), hlm. 44.

untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah difahami.<sup>57</sup>

d. Penarikan kesimpulan (*conclusion drawing/ verification*)

Penarikan kesimpulan dan verifikasi merupakan tahap akhir dari analisis penelitian. Merupakan hasil dari pengumpulan data, proses reduksi data dan penyajian dalam bentuk konten analisis dengan penjelasan-penjelasan. Menurut Miles dan Huberman penarikan kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah jika tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat dan mendukung tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila sebaliknya dimana kesimpulan tahap awal didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.<sup>58</sup>

6. Teknik Uji Keabsahan Data

Uji keabsahan data yang digunakan peneliti dalam melakukan penelitian ini adalah menggunakan uji kredibilitas triangulasi. Triangulasi dalam pengujian kredibilitas ini diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara, dan berbagai waktu. Dengan demikian terdapat triangulasi sumber data, triangulasi teknik pengumpulan

---

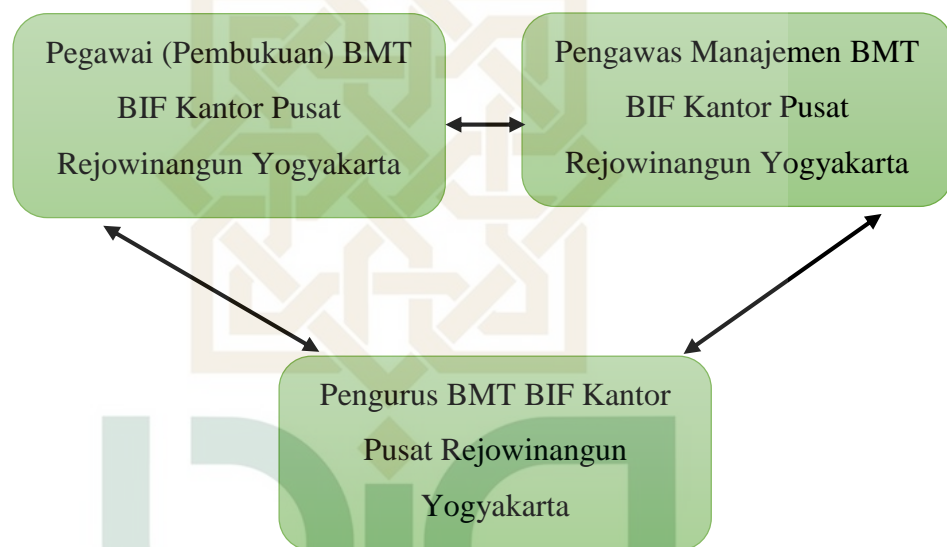
<sup>57</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif*,... hlm. 137.

<sup>58</sup> *Ibid.*, hlm. 141-142.

data, dan triangulasi waktu.<sup>59</sup> Triangulasi yang digunakan oleh peneliti dalam teknik uji keabsahan data yakni triangulasi sumber data dan triangulasi teknik pengumpulan data.

Gambar 1.2

Triangulasi Sumber Data



Triangulasi sumber digunakan untuk menguji kredibilitas data yang dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber. Dalam penelitian ini, yang menjadi sumber data yaitu:

- 1) Pegawai bagian Pembukuan BMT BIF Kantor Pusat Rejowinangun Yogyakarta.
- 2) Pengawas Manajemen BMT BIF Kantor Pusat Rejowinangun Yogyakarta.

<sup>59</sup> *Ibid.*, hlm. 189.

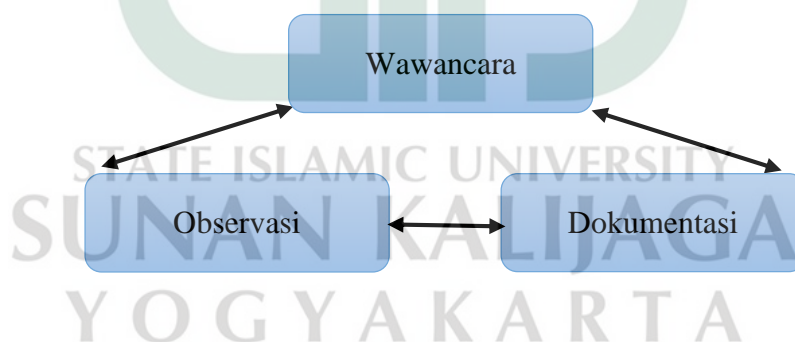


- 3) Pengurus (Ketua dan Bendahara) BMT BIF Kantor Pusat Rejowinangun Yogyakarta.

Uji keabsahan data selanjutnya yakni triangulasi teknik pengumpulan data. Triangulasi teknik digunakan untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. Misalnya data diperoleh dengan wawancara, kemudian dicek dengan observasi, dokumentasi, atau kuisisioner.<sup>60</sup> Jika terdapat data yang berbeda maka diperlukan diskusi lebih lanjut oleh peneliti kepada sumber data untuk mengetahui mana data yang benar, atau bahkan semua data itu benar namun dari sudut pandang yang berbeda.

Gambar 1.3

Triangulasi Teknik Pengumpulan Data



<sup>60</sup> *Ibid.*, hlm. 191.

## H. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dibutuhkan untuk mempermudah pemahaman dan penyusunan skripsi, adapun sistematika pembahasan dalam penelitian ini, yang meliputi:

- BAB I: Pada bab ini berisi tentang pendahuluan, yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian pustaka, kerangka teori, dan metode penelitian.
- BAB II: Pada bab ini menjelaskan tentang gambaran umum lembaga yang diteliti, dan pada penelitian ini adalah gambaran umum dari BMT BIF Kantor Pusat Rejowinangun Yogyakarta berupa sejarah lembaga, letak geografis, visi dan misi, struktur organisasi.
- BAB III: Pada bab ini membahas tentang laporan penelitian yang dikomparasikan dan disinkronkan antara teori dan realita.
- BAB IV: Bab ini merupakan bab terakhir dalam penelitian yang berisi tentang kesimpulan dan hasil penelitian yang disesuaikan dengan rumusan masalah. Saran yang membangun dibutuhkan oleh lembaga, serta mencantumkan daftar pustaka untuk mengetahui referensi yang digunakan, serta lampiran-lampiran.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai sistem pengawasan keuangan di BMT BIF Kantor Pusat Rejowinangun Yogyakarta pada tahun 2020, BMT BIF Kantor Pusat Rejowinangun Yogyakarta dalam menjalankan roda organisasi telah menerapkan sistem pengawasan keuangan dengan baik melalui proses pengawasan yaitu, penetapan standar pelaksanaan (perencanaan), penentuan pengukuran pelaksanaan kegiatan, pengukuran pelaksanaan kegiatan, analisis perbandingan antara pelaksanaan kegiatan dengan standar perencanaan, dan pengambilan tindakan koreksi.

Standar perencanaan yang dijadikan patokan BMT BIF Kantor Pusat Rejowinangun Yogyakarta berdasarkan visi, misi, dan RAT. Pelaksanaan kinerja, seperti laporan keuangan dilaksanakan setiap bulan dengan waktu yang sudah ditentukan, pihak yang dipercaya juga sudah melakukan tanggungjawabnya dengan sebaik mungkin, sehingga laporan keuangan selesai dengan tepat waktu. Penyimpangan keuangan dari faktor internal tidak ada, namun terdapat penyimpangan dari faktor eksternal, yaitu adanya pandemi Covid-19 pada awal 2020 yang sangat berdampak bagi seluruh perusahaan atau lembaga, salah satunya yakni BMT BIF Kantor Pusat Rejowinangun Yogyakarta yang tidak bisa mencapai target yang telah ditetapkan dalam RAT. Sehingga pada tahun 2020 BMT BIF Kantor Pusat Rejowinangun Yogyakarta

mengambil tindakan koreksi dengan membuat kebijakan baru yang tidak menyimpang dari visi, misi dan tujuan didirikannya BMT BIF serta keputusan RAT tahun 2019, untuk menghadapi tantangan tersebut supaya bisa bertahan, dan tidak mengalami kerugian yang semakin besar.

Pengawasan internal BMT BIF Kantor Pusat Rejowinangun Yogyakarta berjalan dengan efektif dan efisien, dilihat melalui pengelolaan dari segi akuntansi. BMT BIF Kantor Pusat Rejowinangun Yogyakarta sudah menerapkan struktur pengawasan keuangan yang baik, pengurus sudah menjalankan tanggungjawabnya dengan semaksimal mungkin, laporan keuangan yang dilakukan sudah menggunakan pedoman akuntansi, dimana semua laporan keuangan masuk dalam sistem dan program komputer yang digunakan sudah sesuai dengan standar akuntansi. selain itu BMT BIF Kantor Pusat Rejowinangun Yogyakarta mempunyai pemimpin yang bijaksana, mempunyai badan atau staf internal audit dan dewan pengawas yang aktif dan kompeten. Namun, pada tahun 2020, BMT BIF Kantor Pusat Rejowinangun Yogyakarta tidak dapat mencapai target yang telah ditetapkan dalam RAT akibat adanya pandemi Covid-19, karena BMT BIF tidak dapat beroperasi secara normal seperti tahun-tahun sebelumnya akibat adanya kebijakan dari pemerintah untuk di rumah saja, sehingga pengurus BMT BIF tidak dapat melakukan jemput bola kepada para anggota, sedangkan sistem yang dilakukan dalam melakukan transaksi hanya sistem *offline*.

## B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah dipaparkan peneliti, maka peneliti memberikan saran-saran yang mungkin akan bermanfaat bagi BMT BIF Kantor Pusat Rejowinangun Yogyakarta untuk lebih baik lagi ke depannya, saran tersebut yaitu, sebagai berikut:

1. Pengawasan yang ada di BMT BIF Kantor Pusat Rejowinangun Yogyakarta hendaknya ditingkatkan lagi, meskipun sudah berjalan dengan baik dan tidak ada penyimpangan dari faktor internal, namun lebih baik jika pengawasan keuangan dipertegas lagi, karena keuangan merupakan salah satu bagian yang sangat penting dalam sebuah lembaga. internal audit dan pengawas manajemen harus selalu mengetahui bagaimana perkembangan dari BMT BIF Kantor Pusat Rejowinangun Yogyakarta. Jika yang dijalankan tidak sesuai rencana, maka sesegara mungkin untuk dicari solusi yang tepat. Sehingga bisa mengatasi penyimpangan-penyimpangan yang ada, baik dari faktor internal maupun eksternal.
2. Menjalankan kebijakan baru yang dibuat selama adanya pandemi Covid-19 dengan semaksimal mungkin, karena jika kebijakan yang ditetapkan dapat berjalan dengan maksimal, kemungkinan besar BMT BIF Kantor Pusat Rejowinangun Yogyakarta tidak mengalami penurunan seperti tahun 2020, dan bisa mencapai target-target yang telah ditetapkan dalam RAT. Kebijakan baru tersebut yakni mendorong transaksi non tunai dengan BIF *Mobile*. BMT BIF Kantor Pusat Rejowinangun Yogyakarta harus memadukan antara sistem *online* dengan *offline*, *offline* disini berarti BMT

BIF tetap melakukan tatap muka dengan para anggota, dengan cara jemput bola mendatangi pasar-pasar, menawarkan langsung ke masyarakat, hal ini harus tetap dipertahankan disamping pengembangan *online*. BMT BIF Kantor Pusat Rejowinangun Yogyakarta harus meningkatkan perubahan pola kerjanya, dari bekerja secara manual berkembang dengan menjalankan sistem transaksi non tunai melalui BIF *Mobile*, supaya transaksi bisa terus berjalan, dan BMT BIF Kantor Pusat Rejowinangun Yogyakarta ditahun yang akan datang bisa mencapai target-target yang telah ditetapkan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adisasmito, Rahardjo, *Pengelolaan Pendapatan & Anggaran Daerah*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011.
- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: Rineka Cipta, 2010.
- Bohari, *Pengawasan Keuangan Negara*, Jakarta: Rajawali, 1992.
- Cahyadi, Thalys Noor, "Baitul Maal wat Tamwil Legalitas dan Pengawasannya", *Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia*, Vol. II, No. 2, 2012.
- Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, *Pedoman Penulisan Skripsi*, Yogyakarta: Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2014.
- Gospers, Vincent, *Perencanaan Strategik untuk Peningkatan Kinerja Sektor Publik suatu Petunjuk Praktik*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Umum, 2004.
- Hafifudhin, Didin dan Hendri Tanjung, *Manajemen Syariah dalam Praktek*, Jakarta: Gema Insani, 2003.
- Handoko, T. Hani, *Manajemen*, Yogyakarta: BPFE, 2015.
- <https://bmt-bif.co.id/halaman/detail/sejarah-singkat>, *Sejarah Singkat BMT Bina Ihsanul Fikri*, 2020.
- <https://lifestyle.kompas.com/read/2011/11/02/23441612/pengawasan.ojk.bolong.dan.koperasi.dan.bmt>, Orin Basuki, *Pengawasan OJK Bolong di Koperasi dan BMT*, 2020.
- <https://republika.co.id/berita/n73i462/bmt-gerakkan-ekonomi-rakyat>, Irwan Kelana, *BMT Gerakkan Ekonomi Rakyat*, 2020.
- <https://shallmanalfarizy.com/2017/12/pengawasan-baitul-maal-wat-tamwil-bmt-berbadan-hukum>, Shallman, *Pengawasan Bitul Maal Wat-tamwil (BMT) Berbadan Hukum*, 2020.
- Kementerian Agama Republik Indonesia, Badan Penelitian, Pengembangan, Pendidikan, dan Pelatihan, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019.
- Kusuma, Mahatva Citra, "Pengawasan Penggunaan Anggaran Keuangan di Yayasan Pondok Pesantren Modern Yatim dan Dhuafa Madania

- Banguntapan, Bantul”, *Skripsi*, Yogyakarta: Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga, 2020.
- Lestari, Sri, “Penyelesaian Sengketa Pembiayaan Macet pada Akad Murabahah di BMT Hubbul Wathon Sumowono”, *Skripsi*, Salatiga: Fakultas Syariah IAIN Salatiga, 2015.
- Mannan, Abdul, *Membangun Islam Kaffah*, Jakarta: Madina Pustaka, 2000.
- Mujiono, Slamet, “Urgensi Regulasi Pengawasan Baitul Wat Tanzil (BMT) di Indonesia”, *Jurnal Ilmu Ekonomi Islam*, Vol. 2, No. 1, 2018.
- Najmudin, *Manajemen Keuangan dan Aktualisasi Syar’iyyah Modern*, Yogyakarta: ANDI, 2011.
- Nida, Khofiya, “Sistem Pengawasan Keuangan Poliklinik UIN Sunan Kalijaga (Tahun 2013-2014)”, *Skripsi*, Yogyakarta: Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga, 2016.
- Ridwan, Ahmad Hasan, *Manajemen Baitul Mal wa Tamwil*, Bandung: Pustaka Setia, 2013.
- Ridwan, Muhammad, *Manajemen Baitu Maal wa Tamwil (BMT)*, Yogyakarta: UII Press Yogyakarta, 2004.
- Ridwan, Muhammad, *Sistem dan Prosedur Pendirian Baitul Mal wat-Tamwil (BMT)*, Yogyakarta: Citra Media, 2006.
- Satriani, “Strategi Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Utara”, *Skripsi*, Makassar: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin, 2017.
- Simbolon, Maringan Masry, *Dasar-Dasar Administrasi dan Manajemen*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2004.
- Sondole, Erlis Milta Rin dkk, “Pengaruh Disiplin Kerja, Motivasi, dan Pengawasan terhadap Kinerja Karyawan pada PT. Pertamina (Persero) Unit Pemasaran VII Pertamina BBM Bitung”, *Jurnal EMBA*, Vol. 3.
- Sudana, I Made, *Manajemen Keuangan Teori dan Praktik*, Surabaya: Airlangga University Press, 2009.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta, 2018.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2013.



Sunarsan, Thomas, *Sistem Pengendalian Manajemen Konsep, Aplikasi, dan Pengukuran Kinerja*, Jakarta: Indeks, 2013.

Susanto, Ahmad, *Konsep, Strategi, dan Implementasi Manajemen Peningkatan Kinerja Guru*, Jakarta: Prenada Media, 2016.

Taufik, Thoriq Almunawir, “Manajemen Pengawasan pada Kelompok Bimbingan Ibadah Haji (KBIH) oleh Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bantul Yogyakarta Tahun 2018”, *Skripsi*, Yogyakarta: Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga, 2020.

